



LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal nama PT berubah menjadi PT

Perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam Keputusan No tanggal
Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

- risalah rapat umum pemegang saham;
- perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pembiayaan yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak / Ibu*) untuk memberlakukan izin usaha PT kepada PT

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PINJAMAN SUBORDINASI

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (7), dengan ini kami laporkan bahwa PT telah menerima pinjaman subordinasi masing-masing dari:

1. PT sebesar*) senilai Rp yang jatuh tempo tanggal tahun
2. PT sebesar*) senilai Rp yang jatuh tempo tanggal tahun

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan foto copy perjanjian pinjaman subordinasi tersebut.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu,**) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) mata uang valas
**) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PERMOHONAN IZIN PENUTUPAN KANTOR CABANG PT

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penutupan kantor yang beralamat di dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan langkah-langkah dan bukti penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KANTOR CABANG PT DI

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Berdasarkan surat izin pembukaan Kantor Cabang PT dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor tanggal, dengan ini dilaporkan bahwa Kantor Cabang kami di telah melakukan kegiatan usaha sejak tanggal

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami lampirkan fotokopi Perjanjian Pembiayaan dimaksud.

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT DI

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang dengan alamat Jl di kota sesuai dengan rencana kerja tahunan PT tahun

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Bukti penguasaan gedung kantor.
2. Rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - b. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama calon kepala cabang serta jumlah karyawan;
 - c. Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak Kantor Cabang melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN MERGER, AKUISISI, DAN KONSOLIDASI

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal telah dilakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi*) antara PTdan PT

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut

1. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham / Rapat Anggota. *)
2. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
3. Akta Merger, akta Akuisisi atau akta Konsolidasi.
4. Data pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau anggota, pengurus, dan pengawas.
5. Status kantor Perusahaan Pembiayaan yang menggabungkan diri atau konsolidasi.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak / Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi

PT

PT

PT

PT

Tembusan:

Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.

*) Coret yang tidak perlu



LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ATAU PENGURUS
DAN PENGAWAS

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal telah dilakukan perubahan direksi/dewan komisaris/pengurus/pengawas *), yaitu:

	Lama	Baru
Komisaris Utama		
Komisaris		
Direktur Utama		
Direktur		

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan / dilaporkan*) kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
2. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas *) meliputi:
 - a. fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan:
 1. tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
 2. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) *fit* dan *proper test* di sektor perbankan;
 3. tidak pernah dihukum karena tindakan pidana kejahatan;
 4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan /perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 5. tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi Direksi;
 6. tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan lain bagi Komisaris;



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

- d. bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus
- e. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus berkewarganegaraan asing.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:

Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.

*) Coret yang tidak perlu



LAPORAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal telah dilakukan perubahan modal dasar, modal disetor dan pemegang saham, yaitu:

	Lama	Baru
Modal dasar		
Modal disetor		

Lama		Baru	
Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)	Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)
.....			
.....			

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Perubahan anggaran dasar yang telah disahkan / dilaporkan*) kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
2. Data pemegang saham atau anggota:
 - a. Dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1, 2, dan angka 3 Peraturan Menteri Keuangan ini serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
 - b. Dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
 1. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal;
 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
 3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1, 2, dan angka 3 Peraturan Menteri Keuangan ini bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus.



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

3. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:

Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.

*) Coret yang tidak perlu



LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Dengan ini dilaporkan bahwa sesuai dengan RUPS tanggal telah dilakukan perubahan anggaran dasar, modal dasar, dan modal disetor*), yaitu:

	Lama	Baru
Modal dasar		
Modal disetor		

Komposisi pemegang saham:

Nama Pemegang Saham	Nilai saham (Rp)	Persentase
.....		
.....		

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan / dilaporkan*) kepada instansi berwenang dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PT

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor tanggal
tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT, dengan
ini dilaporkan bahwa kami telah memulai kegiatan pembiayaan pada tanggal
.....

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan fotokopi Perjanjian
Pembiayaan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, *) kami
ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PERMOHONAN IZIN USAHA

Kepada Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor tanggal
tentang, dengan ini kami:

Nama : PT

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam bidang Untuk
melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen
sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
2. Data Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Data calon pemegang saham/anggota. *)
4. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia.
5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha sebesar Rp. (.....) atas nama PT sebagai setoran modal minimum yang dipersyaratkan.
6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud;
 2. proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
7. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
 - a. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - b. bukti kepemilikan, penguasaan, atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
 - c. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan untuk operasional PT
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 84/PMK.012/2006
TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

8. perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan.
9. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu,*) kami ucapkan terima kasih.

Direksi
PT

Tembusan:
Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan, dan Penjaminan.
*) Coret yang tidak perlu